



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA SUKABUMI

Dede Khaerul Rizal¹⁾, Deni Muhamad Danial²⁾, Erry Sunarya³⁾

Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50, Cikole, Kota Sukabumi, Indonesia

khyrul@ummi.ac.id¹⁾
rdmdanial034@ummi.ac.id²⁾
errysoen@gmail.com³⁾

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di tempat umum khusus nya di terminal A Kota Sukabumi dengan menggunakan teori dari Van Metter dan Van Horn. Dikarenakan masih banyak ditemukan pengunjung, pedagang, bahkan petugas yang kedapatan merokok di dalam kawasan terminal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana unit analisis adalah Dinas Kesehatan kota Sukabumi dan pihak terminal A Kota Sukabumi. Selain dengan melakukan observasi peneliti menggali informasi dengan cara melakukan wawancara terhadap enam orang informan terdiri dari Kepala Seksi Promosi Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Terminal A Kota Sukabumi, Pengunjung, dan Pedagang di dalam terminal. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda kawasan tanpa tanpa rokok di tempat umum khususnya pada terminal A Kota Sukabumi belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Ukuran dan tujuan dari kebijakan belum optimal masih. Sumber daya finansial yang belum cukup sehingga banyak fasilitas yang belum terpenuhi di dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok dan terbatasnya sumber daya waktu serta kurang nya personil Satpol PP dalam melakukan penindakan. Komunikasi antara dinas kesehatan dan pihak pengelola terminal A belum tersampaikan dengan baik dan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Terminal A Kota Sukabumi

Abstract

The purpose of this study is to find out the implementation of the policy of non-smoking areas in public places especially in terminal A kota Sukabumi by using the theories from Van Metter and Van Horn. Because there are still many visitors, traders, even officers who are caught smoking inside the terminal area. The approach used in this study is a qualitative approach where the analysis unit is the Health Office of Sukabumi city and the terminal A of Sukabumi City. In addition to conducting observations researchers dig up information by interviewing six informants consisting of the Head of Health Promotion Section, Pamong Praja Police Unit, Head of Terminal A Sukabumi City, Visitors, and Merchants inside the terminal. The results of the study showed that the implementation of non-smoking regional government in public places, especially in terminal A of Sukabumi City has not been fully realized. The size and purpose of the policy is not optimal there is still a lot of smoking in the terminal. Financial resources are not sufficient so many facilities that have not been met in the implementation of the area without cigarettes and limited time resources as well as the lack of satpol PP personnel in conducting the crackdown. Communication between the health service and terminal manager A has not been conveyed properly and in a surprising way. The economic environment of cheap cigarette prices can be reached by all communities.

Keywords: Non-Smoking Area (KTR), Policy Implementation, Terminal A Sukabumi City

PENDAHULUAN

Merokok merupakan salah satu gaya hidup yang tidak sehat akan tetapi merokok di kalangan masyarakat adalah hal yang biasa. Masyarakat menganggap merokok adalah perilaku yang

bisa membuat dirinya senang, namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kesadaran sendiri untuk tidak merokok ditempat yang sudah ditentukan tidak boleh merokok/kawasan tanpa rokok. Kesadaran masyarakat saat ini sangat rendah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok. Masyarakat cenderung tidak mengindahkan aturan yang sudah dibuat. Masyarakat tetap merokok di lingkungan yang dinyatakan tidak boleh merokok, padahal berbagai peringatan telah dibuat oleh pemerintah yang terdapat pada peraturan menteri kesehatan dan Menteri dalam negeri No. 188/MENKES/PB/2011 No. 7 tahun 2011 tentang pedoman kawasan tanpa rokok sudah di laksanakan.

Kebijakan pemerintah dalam mengubah perilaku masyarakat, pada akhirnya diarahkan dalam bentuk penyadaran akan bahaya rokok bagi kesehatan serta gerakan masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai kebutuhan dasar kesehatan masyarakat, pemerintah mengeluarkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, berupa Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Di Kota Sukabumi Pengawasan Peraturan Daerah (Perda) No.3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kurang tegas dalam hal penindakan. Hal ini terbukti dengan masih banyak masyarakat yang mengabaikan perda KTR tersebut. Tidak sebatas itu saja, maraknya masyarakat yang merokok pada tempat umum seperti terminal A yang memang tidak diperbolehkan untuk merokok, itu menandakan cerminan dari masyarakat yang tidak peduli terhadap kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan himbauan atau aturan yang jelas melarang untuk merokok di tempat yang sudah di tentukan. Semestinya masyarakat sadar dan mentaati atas apa yang diupayakan pemerintah semata-mata itu semua demi kebaikan umum, yang akan bermanfaat dalam jangka panjang yang akan memberikan dampak positif untuk kedepannya.

Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini sudah berjalan lima tahun dari tahun 2014, akan tetapi kawasan-kawasan tanpa asap rokok yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar seperti (sekolahan dan kampus), tempat anak bermain, tempat beribadah, angkutan umum dan terminal kota, serta tempat lainnya itu masih menjadi pertanyaan akan tindak lanjutnya. Selama Peraturan Daerah (Perda) ini diberlakukan tanpa perkembangan yang signifikan dan optimal maka peraturan daerah ini berhasil membuat masyarakat Kota Sukabumi memiliki pola hidup sehat dan bebas asap rokok.

Kebijakan publik menurut Anderson (dalam, Agustino 2016:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai : *"A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern."* Dalam bahasa yang sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang di perhatikan. Kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Menurut Van Metter & Van Horn Agustino (2016 : 142-144), keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu :

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan jika hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

- 2) Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah di

tetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber daya lainnya yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang

hendak di tuju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidak berhasilan suatu implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter & van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

3) Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakter tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (*agen*) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan „dari atas“ (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktifitas pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi pelaksanaan kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter & Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan

politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondusifitas lingkungan eksternal.

Penelitian ini akan mengangkat dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Sukabumi”. Dalam melakukan penelitian, perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil tiga hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, terkait dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Terdapat tiga penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu penelitian yang pertama dilakukan oleh Marchel (2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

implementasi Kawasan Tanpa Rokok di SMP dan sederajat masih belum maksimal, karena masih terdapat siswa, guru, dan karyawan yang berperilaku merokok di lingkungan sekolah. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Saifullah (2019) menyebutkan bahwa implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada angka 41% atau kategori kurang baik. Penyebab utama rendahnya implementasi peraturan daerah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan faktor yang mempengaruhi adalah faktor komunikasi. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fernando (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang cukup baik namun masih ada beberapa kekurangan. Pada aspek komunikasi masih ada masyarakat yang kurang memahami batasan dalam wilayah Kawasan Tanpa Rokok. Dalam aspek sumberdaya Puskesmas Pandanaran memiliki kekurangan dalam tenaga keamanan dan tidak adanya dana yang dikeluarkan untuk Kawasan Tanpa Rokok. Pada aspek disposisi sikap banyak pegawai yang melakukan tugasnya secara ganda untuk menutupi kekosongan yang ada. Kemudian, aspek perubahan perilaku, setiap orang membutuhkan waktu untuk berubah dan terbiasa dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tidak dapat berjalan dengan baik karena beberapa aspek penghambat, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi sikap dan perubahan perilaku.

Rumusan masalah dari penelitian ini mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Terminal Kota Sukabumi dan tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Terminal Kota Sukabumi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2012 : 5) Metode penelitian kualitatif adalah "Penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan dengan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada". Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *Nonprobability Sampling*. Menurut Sugiyono (2017: 95) *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dengan metode *Snowball Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar yang bersifat menjadi membesar seiring dengan berjalannya penelitian serta perlunya pendalaman informasi yang diperlukan dalam melengkapi data yang diperlukan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Kepala Satpol PP, Kepala UPT Terminal, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2017-130) yaitu 1) Pengumpulan data (*Data Collection*); 2) Reduksi data (*Data reduction*); 3) Penyajian data (*Data Display*); dan 4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan dibuat kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Sukabumi adalah memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya asap rokok dan memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat untuk masyarakat. Ukuran kebijakan Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat umum khususnya Terminal A Kota Sukabumi sudah berajalan 4 tahun dan sudah masuk kedalam evaluasi jangka panjang akan tetapi bukti lapangan berdasarkan hasil dari observasi pada awal penelitian peneliti masih melihat banyak orang yang masih merokok di ruang tunggu, di dalam terminal bahkan petugas terminal juga masih merokok sembarangan, ditambah ruangan khusus merokok di terminal A Kota Sukabumi masih belum berfungsi dikarenakan bangunan yang belum selesai. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh

peneliti pada tiga informan didapat hasil bahwa tujuan dari peraturan daerah no 3 tahun 2014 tentang Kawasan tanpa rokok belum tercapai untuk di tempat umum khususnya di terminal A Kota Sukabumi dan peneliti setuju dengan pernyataan informan pertama dan informan kedua yang mengatakan belum sepenuhnya tercapai karena peneliti masih melihat ada orang yang merokok di dalam tempat tunggu, berjualan rokok di dalam area terminal A Kota Sukabumi. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti lapangan realitanya masih ada saja yang melanggar peraturan perda tersebut dengan merokok di sembarang tempat di terminal A kota sukabumi baik itu dari para petugas maupun pengunjung, akan tetapi sudah berkurang yang melakukan pelanggaran bahkan trendnya kian menurun di terminal A Kota Sukabumi.

Adapun untuk informan 4,5, dan 6 mereka belum mengetahui dampak positif dari perda No 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yang sudah berjalan 4 tahun di Kawasan terminal A Kota Sukabumi. Kemudian hasil dari keterangan para informan dapat diinterpretasikan bahwa pihak implementor menyatakan bahwa perda tersebut sudah sesuai dengan realita yang ada lapangan untuk sekarang ini. Meskipun pada kenyataannya masih ada saja pengunjung maupun petugas yang kedapatan merokok di dalam terminal A Kota Sukabumi. Namun ada juga dampak positif dari perda tersebut selain jumlah pelanggar yang turun masyarakat ataupun petugas yang berada di dalam terminal A kota sukabumi berani menegur orang yang kedapatan merokok. Dapat dilihat dari tujuan kebijakan peraturan daerah no 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yaitu memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dari bahaya asap rokok dan memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat sehingga kegiatan masyarakat di dalam terminal A kota Sukabumi tidak terganggu dari asap rokok.

Sumber daya

Ada beberapa unsur yang mempengaruhi keberhasilan dari Implementasi kebijakan yang tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Implementasi kebijakan perda tidak hanya memanfaatkan unsur sumber daya manusia akan tetapi juga memerlukan unsur sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu untuk pengimplementasiannya. Berdasarkan hasil observasi dari Dinas kesehatan Kota Sukabumi, sumber daya manusia yang ada yaitu bagian seksi promosi kesehatan memiliki jumlah pegawai 9 orang, yang terdiri dari 1 kepala seksi, 3 seksi bidang dan 5 orang bagian lapangan yang khusus promosi kesehatan di sekolah-sekolah termasuk promosi bahaya dari zat adiktif seperti rokok. Untuk sumber daya manusia dirasa cukup karena Dinas Kesehatan di lapangan dibantu oleh oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), anak sekolah yang sudah bekerjasama dengan bagian promosi kesehatan dinkes, dan pengelola tempat umum seperti mal, terminal dan tempat lainya. Hasil dari observasi dan wawancara dari ketiga informan tersebut di ketahui informan kedua memaparkan bahwa jumlah pegawai dengan volume pekerjaan yang ada tidak mencukupi di karenakan cakupan luas area yang harus laksanakan di tambah ada 16 perda yang lain yang harus di laksanakan juga. Akan tetapi dari informan 1 dan informan 2 ketahui dua pendapat yang sama dimana jumlah pegawai mencukupi dengan volume pekerjaan yang harus di laksanakan. Berdasarkan hasil wawancara berdasarkan sumberdaya manusia cukup untuk implementasi kebijakan daerah no 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di tempat umum khususnya terminal A Kota Sukabumi. Adapun untuk informan 3,4, dan 6 mereka tidak mengetahui jumlah dari pegawai yang terlibat dari penegekan peraturan daerah Kawasan tanpa rokok di terminal kota sukabumi. Mereka menjawab "tidak tahu".

Dari segi sumber daya finansial untuk penyelenggaraan kawasan tanpa rokok di terminal A Kota Sukabumi rencana akan menyelenggarakan sosialisasi /penyuluhan kepada pengunjung, pedagang, dan petugas terminal A Kota Sukabumi yang nantinya terminal A Kota Sukabumi bebas dari asap rokok dengan membagikan buku saku tentang KTR, membangun fasilitas khusus ruangan merokok yang saat ini belum rampung di bangun, dan memasang AC (*Air Conditioner*) di ruang tunggu terminal A Kota Sukabumi, namun untuk itu semua di butuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga pada saat ini untuk melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada terminal A Kota Sukabumi belum sepenuhnya terealisasi di karenakan dana yang terbatas. Hasil dari wawancara dengan informan satu dan informan 2 menyatakan bahwa sumber daya finansial belum memadai dan untuk fasilitas khusus merokok itu cenderung saling tuduh terkait pemberian fasilitasnya sehingga dalam implementasi Kawasan tanpa rokok di tempat

umum khususnya di terminal A Kota Sukabumi sumber daya finansial dan fasilitas belum terpenuhi. Adapun untuk informan 2, 4, 5, dan 6 tidak mengetahui adanya buku saku dan fasilitas ruangan khusus merokok di terminal A Kota Sukabumi. Mereka menjawab “ belum mengetahui”.

Dari segi sumber daya waktu, berdasarkan hasil dari observasi tidak adanya petugas satpol PP di Terminal A Kota Sukabumi yang bertugas, bahkan untuk program Operasi TIPIRING (Tindak Pidana Ringan) dan operasi yustisi tidak dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan, operasi tipiring sendiri pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan penijauan kembali menyatakan anatara lain bahwa Tipiring merupakan jenis tindak pidana yang dapat di golongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Dengan begitu sumberdaya waktu belum optimal didalam penegakan hukum implementasi kebijakan Kawasan tanpa rokok di terminal A Kota Sukabumi merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP sendiri melakukan operasi Kawasan tanpa rokok di kota sukabumi selama 3 bulan sekali atau dalam satu tahun 4 kali.

Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan wawancara dan observasi diinterpretasikan bahwa karakteristik dari agen pelaksana sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi nya dari masing-masing dapat dilihat dari Dinas kesehatan sudah mesosialisasikan tentang KTR begitu pula dengan Satpol PP yang sudah menjalankan tugasnya yaitu melakukan operasi Kawasan tanpa rokok, akan tetapi dalam tindakannya masih belum membuat efek jera bagi para pelanggar kawasan tanpa rokok, seharusnya pihak dari satpol dan pihak pengelola melakukan tindakan yang tegas sesuai dengan pasal 19 tentang penertiban yaitu dengan penghentian kegiatan berjualan, penarikan barang/produk. Dan belum terbentuknya tim khusus untuk penanggulangan Kawasan tanpa rokok. Selain itu cakupan dari implementasi kebijakan semakin luas, maka seharusnya semakin besar pula agen yang di libatkan dalam pelaksanaan perda ini. Sehingga untuk merubah perilaku masyarakat Kota Sukabumi untuk mencapai tujuan dari implementasi kebijakan bisa tercapai.

Sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana

Sikap dari para implmentor kebijakan sudah memahami dan menerima peraturan daerah. Akan tetapi fakta dilapangan para implementor belum cukup efektif di dalam melaksanakan tugas dikarenakan peneliti masih melihat adanya perokok aktif dan penjual rokok di dalam terminal A Kota Sukabumi. Hasil dari menelaah dari ketiga informan tersebut mengenai langkah yang sudah di lakukan agen pelaksana Sikap para pelaksana kebijakan menerima kebijakan peraturan daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Daerah. Akan tetapi para pelaksana kebijakan tidak tau keinginan para pengunjung dan pedagang di dalam terminal A Kota Sukabumi. Berdasarkan hasil dari observasi kepada pengunjung dan pedagang yang ada di dalam terminal kurang setuju diadakannya kawasan tanpa rokok di terminal A Kota Sukabumi di karenakan fasilitas yang kurang dan pendapatan yang akan berkurang juga. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada informan 4, 5, dan 6 terkait dengan sikap mereka ada yang setuju di berlakukannya Kawasan tanpa rokok dan ada juga yang kurang begitu setuju dengan kebijakannya tersebut di karenakan bagi para pedagang omset berjualan akan berkurang dan rokok sudah menjadi seperti kebutuhan pokok.

Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktifitas pelaksana

Berdasarkan hasil dari observasi di media komunikasi Dinkes dan terminal A Kota Sukabumi berupa sosialisasi dalam bentuk pemasangan poster kawasan tanpa rokok di dalam ruang tunggu terminal pada tahun 2016 saat peresemian terminal, dan untuk saat ini poster tersebut udah tidak lagi di area terminal A kota Sukabumi. Bentuk komunikasi antar organisasi antara pihak dinas Kesehatan dengan pihak satuan polisi pamong praja dan pihak pengelola terminal A kota sukabumi yaitu dengan saling kordinasi tentang Langkah-langkah penindakan, serta dilibatkan dalam penyusunan peraturan dan turunannya. Hasil dari wawancara ketiga informan tersebut di temukan tiga pendapat yang hampir sama mengenai komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Komunikasi berjalan dengan baik antara Dinas Kesehatan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Terminal A Kota Sukabumi. Adapun untuk

informan 4,5, dan 6 mereka tidak mengetahui komunikasi yang dilakukan oleh agen pelaksana. Mereka menjawab “tidak tahu”. Mengenai stiker, poster ataupun spanduk tentang kawasan tanpa rokok di terminal A Kota Sukabumi kenapa sudah tidak ada lagi terpasang penjelasan dari pihak dinas Kesehatan yaitu karena lebih fokus sosialisasi covid-19.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Berdasarkan kondisi sosial merokok sudah menjadi tradisi dimasyarakat sehingga sangat sulit untuk merubahnya ditambah dengan harga rokok yang murah sehingga semua kalangan masyarakat bisa membelinya, sedangkan dilihat dari segi ekonomi rokok menjadi nilai jual yang cukup tinggi. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan didapati hasil bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik kurang begitu baik dapat menjadi kegagalan dalam implementasi kebijakan publik. Pada saat ini rokok sudah menjadi salah satu kebutuhan sekunder yang menempati posisi primer bagi sebagian kalangan di masyarakat. Dari sisi ekonomi rokok merupakan salah satu sumber pendapatan dari para pedagang dan juga salah satu pengeluaran terbesar bagi para konsumen.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah di laksanakan mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Terminal A Kota Sukabumi masih belum maksimal masih banyak kelemahan yang ada di dalam setiap dimensinya, dapat di ambil simpulan pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan sudah sangat jelas di paparkan bahwa tempat-tempat umum seperti terminal A Kota Sukabumi harus bebas dari asap rokok agar tidak mengganggu masyarakat yang ada di dalam terminal A Kota Sukabumi, apabila ukuran dan tujuan dari kebijakan belum sesuai dengan harapan maka di pastikan kebijakan kawasan tanpa rokok tersebut belum berjalan efektif cenderung memunculkan kesalahan. Pada dimensi sumber daya untuk bagian promosi sudah memadai jumlah nya sesuai dengan volume pekerjaan. Akan tetapi untuk pelaksanaan penindakan belum memadai dan kurang jumlah pekerjaan dengan volume pekerjaan yang ada di tambah dengan kurangnya sumberdaya finansial dan terbatasnya sumberdaya waktu yang belum memadai. Pada dimensi karakteristik agen pelaksana masih mempunyai kelemahan yaitu tidak adanya ketegasan dalam penindakan sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelanggar hanya sebatas di berikan teguran. Pada dimensi sikap/kecendrungan (*disposition*) para pelaksana, agen pelaksana sudah mengerti dengan peraturan kawasan tanpa rokok tersebut akan tetapi respon dari para pengunjung dan pedagang seakan tidak peduli dan acuh terhadap perda tersebut. Pada dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana belum terbentuk secara baik dan seakan saling tuding untuk pengadaan fasilitas pendukung untuk kawasan tanpa rokok seperti ruangan khusus merokok, poster, dan baligho larangan merokok. Pada lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merokok tidak memandang dari status sosial hampir semua kalangan di masyarakat bisa mendapatkan rokok dengan mudah. Dengan dimensi ekonomi, sosial dan politik tersebut membuat para agen pelaksana terhambat dalam pelaksanaan implementasi kawasan tanpa rokok.

Adapun implikasi dari penelitian ini bagi dinas terkait yaitu keberhasilan implementasi kawasan tanpa rokok di terminal A Kota Sukabumi terlaksana maka Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan Satpol PP lebih gencar dalam melakukan promosi dan sosialisasi di terminal A, dan menambah personil Satpol PP dikarenakan kurang sumber daya manusianya karena ada 16 Perda lain yang harus di laksanakan juga selain dari perda Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Fernando, R., & Marom, A. (2016). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 466-479.
- Marchel, Y. A. (2019). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 7(2), 144-155.



- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Saifullah, S., Ikbah, M., & Thamrin, H. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 44-55.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses Dan Studi Kasus: Cetakan Kedua*. CAPS: Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri No. 188/MENKES/PB/2011 No. 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok